

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

(Studi di Kelurahan Tanjunggading Kecamatan Tanjungkarang Timur  
Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)

Oleh: Romi Saputra

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## ABSTRACT

*This study discusses the effectiveness, supporting and inhibiting factors and formulate strategies to overcome obstacles in the implementation of the the Physically Empowerment Program Social Problems through the Joint Business Group in the Village Tanjunggading Bandar Lampung City. The design used in this research using descriptive method with qualitative-inductive approach. Data analysis techniques used in descriptive research through data selection, data reduction and verification of data and using SWOT analysis in order to formulate strategies to overcome obstacles.*

*The results of this study can be explained that the effectiveness of implementation of the People Empowerment Program Social Problems through the Joint Business Group (KUBE) in Tanjunggading Village generally been effective as seen from the achievement on Program Objectives, Increasing Income, and Ability to Solve Social Problems Increased Functionality of Members, but there are programs that can not be achieved in accordance with the objectives of the Sustainability Program, especially in the capital increase business.*

*Supporting factors in the implementation of this program are active members in managing their business, Motivation members to implement and manage the business is high enough, the support from the community and coaching. While the inhibiting factors are: management and assistance that have not been effective, Human Resources (members) are still low, the absence of additional capital in order to develop joint business groups, marketing the products that have not reached the market and Unfair Business Competition.*

*Appropriate strategies used to overcome barriers that permit service quality improvement (1) Human Resource Development (Member) KUBE and established a partnership with Micro Finance Institutions, (2) Change renewal Management KUBE and Utilizing advances in information technology, (3) Revitalization KUBE Organization, (4) Making Adjustments and evaluation of programs and activities are a priority and the provision of venture capital in order to increase business KUBE.*

**Keywords:** *empowerment, social problems, poverty reduction*

## ABSTRAK

**P**enelitian ini membahas efektivitas, faktor penghambat dan pendukung serta merumuskan strategi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan

Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Tanjunggading Kota Bandar Lampung.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif-induktif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif melalui seleksi data, reduksi data dan verifikasi data serta menggunakan analisis SWOT guna merumuskan strategi mengatasi hambatan.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjunggading secara umum sudah efektif yang dilihat dari ketercapaian tujuan program, peningkatan pendapatan, dan mampu mengatasi asalah peningkatan keberfungsian sosial anggota, akan tetapi ada program yang belum dapat tercapai sesuai dengan tujuan yaitu mengenai keberlangsungan program terutama dalam penambahan modal usaha.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini yaitu aktifnya anggota dalam mengelola usahanya, Motivasi anggota untuk melaksanakan dan mengelola usaha cukup tinggi, Adanya dukungan dari masyarakat dan pembinaan. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu: Manajemen dan pendampingan yang belum efektif, Sumber Daya Manusia (anggota) yang masih rendah, Tidak adanya penambahan modal usaha guna pengembangan kelompok usaha bersama, Pemasaran hasil produksi yang belum menjangkau pasar dan Persaingan Usaha.

Strategi yang tepat digunakan untuk mengatasi hambatan peningkatan kualitas pelayanan perizinan yaitu (1) Melakukan Pengembangan sumber daya manusia (Anggota) KUBE dan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, (2) pembaharuan manajemen pengelolaan KUBE dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, (3) Revitalisasi organisasi KUBE, (4) Melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan secara prioritas serta penyediaan modal usaha guna peningkatan usaha KUBE.

**Kata kunci:** pemberdayaan, masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan.

## PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya disebabkan faktor ekonomis namun berkaitan pula dengan kerentanan dan kerawanan seseorang atau kelompok masyarakat untuk menjadi miskin. Paradigma kemiskinan yang menyangkut sifat, kondisi dan konteks kemiskinan menjadi sangat penting dalam menerapkan langkah kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga

belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejak tahun 1980. Melalui pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin sehingga proses peningkatan kesejahteraan

masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Upaya melakukan pengentasan dan penanggulangan kemiskinan Pemerintah memiliki banyak program yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga. Program-program tersebut dalam pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi antara satu dengan yang lain. Sehingga dapat terjadi dalam pelaksanaannya ada dua atau lebih program yang dilaksanakan pada satu daerah yang sama. Program-program yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga tersebut dalam pelaksanaannya memiliki standar operasional yang berbeda-beda. Melihat hal tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, adalah program yang di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan.

Tabel 1

**Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011**

1. Pembinaan Lanjutan Pemberdayaan Fakir Miskin;  
Sasaran : KUBE Fakir Miskin  
Masukan : Dana sebesar Rp. 75.000.000,-  
Keluaran : Dibinanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin  
Hasil : Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengelola usahanya akan tetap berjalan dan memperoleh hasil usaha yang memuaskan  
Target Kinerja : 43 KUBE (430 KK)
2. Pembinaan Keluarga Muda Mandiri;  
Sasaran : Keluarga Muda Mandiri (KMM)  
Masukan : Dana sebesar Rp. 25.543.000,-  
Keluaran : Dibinanya Keluarga Muda Mandiri  
Hasil : Meningkatnya tarap hidup bagi Keluarga Muda Mandiri  
Target Kinerja : 15 orang
3. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan;  
Sasaran : Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)  
Masukan : Dana sebesar Rp. 58.993.000,-  
Keluaran : Dilaksanakannya Monitoring Program Keluarga Harapan  
Hasil : Program Keluarga Harapan dapat terevaluasi  
Target Kinerja : 14 Kecamatan

4. Pembinaan Bagi Wanita Tuna Susila dan Wanita Rentan Tindak Tuna Susila;
 

Sasaran	:	Wanita Tuna Susila dan Wanita Rentan Tindak Tuna Susila
Masukan	:	Dana sebesar Rp. 8.624.000,-
Keluaran	:	Dilaksanakannya Bimbingan Sosial bagi Wanita Tuna Susila dan Wanita Rentan Tindak Tuna Susila
Hasil	:	Wanita Tuna Susila dan Wanita Rentan Tindak Tuna Susila dapat melaksanakan fungsi sosialnya
Target Kinerja	:	70 orang
5. Pembinaan Bagi eks Narapidana;
 

Sasaran	:	Eks Narapidana
Masukan	:	Dana sebesar Rp. 33.571.400,-
Keluaran	:	Dilaksanakannya Bimbingan Sosial bagi Eks Narapidana
Hasil	:	Eks Narapidana memiliki keterampilan dan tumbuh percaya diri
Target Kinerja	:	20 orang
6. Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kawasan Industri Tembakau;
 

Sasaran	:	Keluarga Fakir Miskin
Masukan	:	Dana sebesar Rp. 53.500.101,-
Keluaran	:	Terbentuknya Keluarga Miskin Dalam Memperoleh Modal Usaha
Hasil	:	Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Kawasan Industri Tembakau
Target Kinerja	:	130 Kepala Keluarga (13 KUBE)
7. Bantuan Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penderita Penyakit Kronis Dampak Merokok;
 

Sasaran	:	Para Exs Penderita Penyakit Kronis Dampak Merokok
Masukan	:	Dana sebesar Rp. 25.000.000,-
Keluaran	:	KBS Eks Penderita Penyakit Kronis Dampak Merokok Semakin Percaya Diri
Hasil	:	KBS Eks Penderita Penyakit Kronis Dampak Merokok Mengelola UEP untuk Meningkatkan Kesejahteraannya.
Target Kinerja	:	50 Orang (5 KUBE)
8. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga.
 

Sasaran	:	Keluarga Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Keluaraga fakir miskin
Masukan	:	Dana sebesar Rp. 99.629.225
Keluaran	:	Terbinanya Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Miskin
Hasil	:	Keluarga Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Fakir Miskin dapat meningkatkan kesejahteraan
Target Kinerja	:	60 Orang (6 KUBE)

Penduduk yang termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung mengalami peningkatan baik kuantitas maupun intensitas. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan

memerlukan penanganan secara khusus. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut, diperlukan data/informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan secara akurat, terpercaya dan tepat waktu.

Tabel 2

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Persentase
1.	Anak Balita Terlantar	1,372	1.39%
2.	Anak Terlantar	4,069	4.11%
3.	Anak Nakal	509	0.51%
4.	Anak Jalanan	95	0.10%
5.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	8,457	8.55%
6.	Korban Tindak Kekerasan	217	0.22%
7.	Lanjut Usia	8,301	8.39%
8.	Penyandang Cacat (Penca)	10,057	10.17%
9.	Tuna Susila	244	0.25%
10.	Pengemis	91	0.09%
11.	Gelandangan	78	0.08%
12.	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	452	0.46%
13.	Korban Penyalahgunaan Napza	164	0.17%
14.	Keluarga Fakir Miskin	53,168	53.76%
15.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	8,678	8.77%
16.	Keluarga Bermasalah Sosial	298	0.30%
17.	Komunitas Adat Terpencil	220	0.22%
18.	Korban Bencana Alam	199	0.20%
19.	Korban Bencana Sosial	67	0.07%
20.	Pekerja Migran	239	0.24%
21.	Orang Dengan HIV/AIDS	-	0.00%
22.	Keluarga Rentan	1,929	1.95%
JUMLAH		94,839	100%

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung, 2016.

Data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandar Lampung sebagaimana tabel berikut ini:

### Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Tanjunggading Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan

Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Tanjunggading Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung?

- c. Strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Tanjunggading Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung?

### KAJIAN TEORETIS

#### Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Dunn (2003: 429) "efektivitas (*effectiveness*) berkenaan

dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan”. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Tyson (1992: 230) ”efektivitas dapat didefinisikan sebagai kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah”.

”Kajian teori organisasi efektivitas dari pendekatan pencapaian tujuan (*the goal approach*) diartikan sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya” (Robbins, 1995: 53). Dunn (1999: 429), menjelaskan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasional teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan. Efektivitas organisasi dikaji dari jumlah yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu unit keluaran (*unit of output*). Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Osborne dan Gaebler (2005: 389), sebagai berikut.

Efektivitas berbeda dengan efisiensi, efisiensi merupakan ukuran berapa biaya untuk masing-masing output (volume yang diproduksi), sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas output itu: bagaimana mencapai outcome (kualitas atau efektivitas produksi). Dengan demikian maka konsep efektivitas lebih menekankan kepada kualitas dari pada perbandingan biaya tiap unit keluaran.

Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauhmana pencapaian dari hasil yang telah didapat dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengukur efektivitas diperlukan suatu indikator untuk mengukur pencapaian hasil dari tujuan yang telah ditetapkan.

### Implementasi Program

Istilah “Implementasi” berasal dari bahasa Inggris yakni *“Implementation”* yang berarti pelaksanaan. Istilah ini selalu berkonotasi sebagai kegiatan atau *activity*, bahkan kedua istilah itu sering digunakan dalam suatu konteks pengertian, yakni *implementation activity*.

Pariata Westra (1997: 155) merumuskan pengertian *implementasi activity* sebagai

usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Program menurut Terry (dalam Tachjan, 2008: 31) mendefinisikan bahwa:

*A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets.*

Bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan *budget*.

Berdasarkan permasalahan pokok yang berkembang serta prioritas pemecahannya pada setiap unit administratif, program tersebut dapat dikelompokkan secara berjenjang ke dalam: *“Program categories, Program sub-categories, Program elements”*. Atas dasar pengelompokan tersebut di atas, struktur program dapat tersusun secara berjenjang ke dalam: Program Induk, Program Utama, Program/kegiatan.

### Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan berkelanjutan. Untuk tercapainya kesejahteraan sosial dimaksud maka diperlukan basis data yang kompeten

dan valid sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Sosial dipandang perlu menetapkan sumber data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat, dan terkini.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi dan berbagai gejala kemasyarakatan menimbulkan banyak masalah sosial. Apabila tidak segera ditangani, maka masalah ini akan semakin menyebar dan semakin berdampak pada masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang terintegrasi dan terorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah sosial timbul dari berbagai sebab, baik faktor pelaku (*internal factors*) maupun faktor lingkungan (*eksternal factors*). Faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan berinterdependensi, sehingga masalah sosial biasanya kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Masalah sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan, sehingga masalah sosial hanya bisa didekati secara lintas sektor dan interdisipliner.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.

Saat ini Kementerian Sosial menangani 22 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu sebagai berikut.

1. **Anak Balita Telantar**, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah

seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.

2. **Anak Telantar**, adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
3. **Anak Nakal**, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
4. **Anak Jalanan**, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
5. **Wanita Rawan Sosial Ekonomi**, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
6. **Korban Tindak Kekerasan**, adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.
7. **Lanjut Usia Telantar**, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. **Penyandang Cacat**, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.

9. **Tuna Susila**, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. **Pengemis**, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
11. **Gelandangan**, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. **Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)**, adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
13. **Korban Penyalahgunaan NAPZA**, adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
14. **Keluarga Fakir Miskin**, adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
15. **Keluarga Berumah Tidak Layak Huni**, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratanyang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
16. **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis**, adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami -istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
17. **Komunitas Adat Terpencil**, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
18. **Korban Bencana Alam**, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
19. **Korban Bencana Sosial atau Pengungsi**, adalah perorangan, keluarga atau



kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

20. **Pekerja Migran Telantar**, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi telantar.
21. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)**, adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar.
22. **Keluarga Rentan**, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk mewujudkan usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**, adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.
2. **Organisasi Sosial**, adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial
3. **Karang Taruna**, adalah Organisasi Sosial Kepemudaan, wadah pengembangan

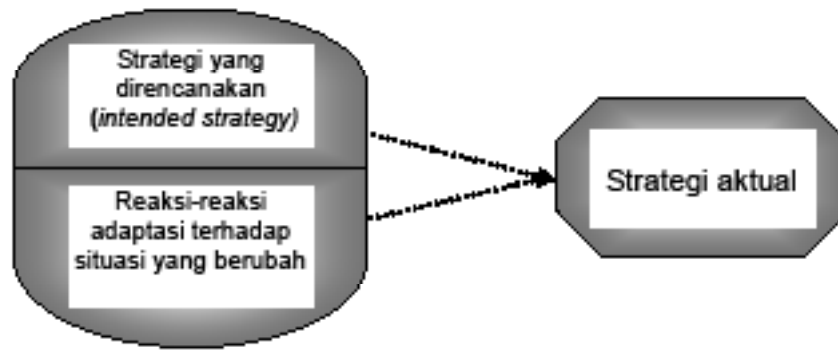
generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri.

4. **Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)**, adalah sistem kerja sama antar keberangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja dari pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.
5. **Dunia Usaha yang Melakukan UKS**, adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta atau wirausahawan beserta jaringannya yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

### Konsep Strategi

Strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap manajer. Sejak beberapa tahun yang lampau, pengertian strategi makin banyak mendapatkan perhatian dan dibahas dalam literatur. Adapun perhatian terhadap istilah strategi muncul, oleh karena orang menyadari bahwa setiap organisasi memerlukan sebuah skope yang terumuskan dengan baik, kearah pertumbuhan dan sasaran-sasaran dapat memenuhi kebutuhan, sehingga diperlukan peraturan-peraturan keputusan tambahan/pendukung, agar organisasi yang bersangkutan dapat mencapai pertumbuhan teratur.

Strategi memiliki sifat *proaktif (diintensif)* dan *reaktif (adaptif)* terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.

**Strategi aktual, sebagian bersifat direncanakan dan sebagian bersifat terhadap situasi dan kondisi yang berubah. (Winardi, 2003: 107)**

Hetten and Hetten dalam Salusu (1996: 108) memberikan beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga ia bisa sukses:

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus perkembangan masyarakat dalam lingkungan yang memberikan peluang untuk bergerak maju.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraikan satu dengan yang lain. Persaingan yang tidak sehat antar berbagai unit kerja dalam organisasi seringkali mengklaim sumber dayanya, memberikannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
5. Sumber daya adalah suatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin anda harus membuat sesuatu memang layak dan dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati sehingga tidak menjerumuskan organisasi kedalam lubang yang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi haruslah dapat dikontrol.
7. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan telah dicapai. Jangan menyusun strategi diatas kegagalan.
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditempatkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

#### **Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari ; karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka hadapi itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka

jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Soekanto (1990: 365) mengartikan “kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut”. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. Pada masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial, karena mereka menganggap bahwa semua telah ditakdirkan, sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya. Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu problema sosial karena sikap yang membenci kemiskinan. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Menurut Subroto (2005: 4), “kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimal dengan urutan prioritas yakni: cukup pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan rekreasi”. Menurut Soetrisno (2002: 16-17), kemiskinan dapat dipahami melalui akar penyebabnya yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

### 1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan kategori ini timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah, artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah faktor alam yang kurang menguntungkan. Keadaan kemiskinan yang demikian mungkin saja terjadi perbedaan-perbedaan kemampuan (kekayaan), tetapi dampak perbedaan

tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata tradisional, seperti pola hubungan patronclient, jiwa gotong royong, dan sejenisnya yang secara fungsional dapat meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

### 2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan kategori ini lebih disebabkan oleh struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Menurut Subroto (2005: 4), indikator kemiskinan adalah sebagai berikut.

#### 1. Cukup Pangan

Yaitu apabila seseorang mampu mengonsumsi pangan <2.100 kalori per hari atau kurang dari dua kali makan makanan pokok per hari. Kecukupan pangan adalah indikator paling penting untuk menentukan tingkat kegawatan kemiskinan. Mengingat pangan adalah kebutuhan dasar hidup manusia maka apabila masyarakat atau seseorang kekurangan pangan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil usahanya maka tingkat kemiskinan masyarakat atau seseorang pada kondisi demikian dapat dikatakan sangat miskin.

#### 2. Cukup Sandang

Yaitu apabila seseorang mempunyai atau mampu membeli kurang dari dua setel pakaian dalam satu tahun untuk diri dan keluarganya. Kecukupan sandang adalah indikator paling penting berikutnya. Mengingat sandang adalah kebutuhan primer untuk kesehatan dan bersosialisasi. Maka apabila masyarakat atau seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang tersebut maka dapat dikatakan miskin.

### 3. Cukup Papan

Apabila masyarakat atau seseorang tidak atau belum mampu tinggal pada tempat tinggal (rumah) yang layak huni dalam kriteria tersedia cukup air (untuk mandi, cuci dan kakus), cukup sirkulasi udara dan cahaya serta mempunyai sistem sanitasi yang sehat maka dapat digolongkan cukup miskin. Mengingat papan adalah kebutuhan primer untuk kehidupan berkeluarga dan masyarakat maka kekurangan papan yang layak huni dapat menjadi indikator penting kemiskinan.

### 4. Cukup Pendidikan

Apabila seseorang belum mampu membiayai pendidikan, minimal pendidikan dasar sembilan tahun bagi anggota keluarganya terutama anaknya maka tergolong miskin, karena pendidikan adalah kebutuhan primer untuk pembangunan sumber daya manusia.

### 5. Cukup Kesehatan

Apabila masyarakat atau seseorang belum mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan modern minimal puskesmas terdekat dan tidak berperilaku hidup sehat maka tergolong miskin, mengingat kesehatan dan perilaku hidup sehat adalah kebutuhan primer untuk pembangunan sumber daya manusia.

### 6. Cukup Rekreasi

Apabila seseorang atau masyarakat belum mampu melakukan rekreasi ulang atau membangun kreasi mental dan spiritual minimal satu kali dalam satu minggu untuk membangun motivasi, inovasi serta sikap mental positif sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan baik secara kolektif maupun individual melalui kegiatan rekreasi. Kegiatan rekreasi tersebut seperti melaksanakan ibadah ritual agama, mendengarkan radio, *tape recorder*, televisi, tamasya, olahraga, berkesenian. Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dapat digolongkan

miskin karena rekreasi juga termasuk kebutuhan primer untuk membangun potensi produktif sumber daya manusia lahir dan batin.

## METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif dengan pola pendekatan *kualitatif*. Bogdan dan Taylor (Basrowi & Suwandi, 2008: 1), menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif-induktif. Menurut Nasir (2005: 63), metode deskriptif adalah:

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM

#### Keberlangsungan Program

Kontinuitas program sangat diperlukan untuk keberlangsungan program dan perkembangan sebuah kelompok. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan KUBE, kegiatan-kegiatannya dan bidang usaha yang dikembangkan harus diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan bukan hanya untuk sementara waktu saja. KUBE sebagai lembaga ekonomi dan sosial bukan hanya menekankan pada aspek ekonomi saja namun menekankan pula pada aspek sosial yaitu kepedulian dan kesetiakawanan

social dengan cara melibatkan masyarakat di lingkungannya untuk ikut serta dalam proses produksi yang dilakukan oleh para anggotanya. Jadi, bukan hanya anggota KUBE saja yang meningkat penghasilannya, akan tetapi masyarakat sekitarnyaapun harus merasakan manfaat dari keberadaan KUBE ini.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa keberlangsungan program dalam kegiatan KUBE di kelurahan Tanjunggading yang diwakili oleh KUBE Tanjunggading I dalam efektivitas keberlanjutan program KUBE dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari insentif bagi hasil kepada masing-masing anggotanya walalupun tidak begitu besar.

### **Ketercapaian Tujuan Program**

Tujuan program pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) adalah:

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok;

Pendekatan kelompok melalui kelompok usaha merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif untuk masyarakat lapisan bawah. Keberadaan kelompok akan memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya karena dapat dipakai untuk meningkatkan kemampuan berusaha, mengembangkan pengetahuan dan sistem nilai yang mendukung kehidupan usaha, menyuburkan moralitas usaha yang baik, dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih luas seperti usaha, kerumahtanggaan, kemasyarakatan. Peran dan tanggungjawab masing-masing pengurus KUBE Tanjunggading sudah baik, hal ini dilihat dari bagaimana para anggota sudah mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing, yang penting bagi kelompok di KUBE ini adalah keterbukaan, kebersamaan dan kejujuran dalam mengelola usaha ternak ini.

- 2) Peningkatan pendapatan;  
Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok.

Mereka berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, tempat berteduh dan lain- lain. Program KUBE adalah program pemberian bantuan stimulan modal usaha ekonomi produktif (UEP). Bantuan modal UEP yang diperoleh anggota KUBE besarnya bervariasi digunakan untuk menambah modal serta mengembangkan usaha. Bantuan modal bagi keluarga miskin yang menjadi anggota KUBE berdampak cukup besar terhadap kelangsungan usaha dan peningkatan pendapatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam peningkatan pendapatan anggota KUBE sebelumnya pendapatan yang tidak menentu karena kerja serabutan dan tidak pasti yang berkisar antara 15.000-20.000 per hari dan itupun kadang-kadang dan tidak pasti, setelah adanya program KUBE ini anggota mendapat pendapatan yang jelas.

- 3) Pengembangan usaha.

Modal yang dimiliki anggota untuk menjalankan usaha sangat terbatas tetapi anggota kesulitan untuk menambah modal. Tambahan modal hanya mengandalkan bantuan dana bergulir dari pemerintah. Modal dari luar khususnya dari lembaga keuangan formal seperti koperasi dan bank belum dapat diakses karena adanya hambatan prosedural berupa penilaian kualifikasi perbankan yang meliputi: karakter, agunan, kemampuan mengembalikan pinjaman, modal dan kondisi ekonomi yang ditentukan.

- 4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dan masyarakat sekitar.

Gotong royong, kepedulian dan kesetiakawanan sosial merupakan salah satu tujuan dari KUBE diKelurahan Tanjunggading, karena dengan tujuan tersebut, maka keberhasilan program KUBE tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok KUBE saja akan tetapi masyarakat disekitar juga harus

ikut menikmati keberhasilan program ini. Kepeduliaan dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dan masyarakat sekitar tercermin dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga Kelurahan Tanjunggading.

**Faktor-Faktor yang Memengaruhi dan Strategi yang Dilakukan**

Peningkatan pendapatan dengan adanya program KUBE ini tidak hanya dirasakan oleh anggota KUBE saja, akan tetapi masyarakat yang ada disekitarnya juga dapat menikmati melalui pinjaman modal tanpa bunga yang di berikan oleh KUBE guna mengembangkan usaha warungnya. Dengan demikian simbiosis mutualisme dengan adanya program KUBE di Kelurahan Tanjunggading ini dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi anggota dan masyarakat yang ada disekitarnya.

Kemiskinan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu berupa ketidakmampuan dari dalam individu atau kelompok masyarakat seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, sikap dan perilaku miskin, ketidakcakapan bekerja, pasrah terhadap kondisi miskin dan

Faktor lain yang menyebabkan mereka tidak berdaya untuk memiliki akses dan sumber daya. Namun demikian, sangat sulit untuk memisahkan faktor penyebab kemiskinan karena penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Keberadaan KUBE bagi warga miskin ditengah-tengah masyarakat diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, wahana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga miskin, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan keluarga miskin, pengembangan diri, dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota. Pada intinya KUBE mempunyai tujuan agar keluarga miskin dapat mencapai tingkat kesejahteraannya sehingga keberfungsian sosial masyarakat miskin menjadi semakin baik.

Berdasarkan urain-urain kondisi lingkungan eksternal dan internal ditampilkan analisis SWOT faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dipandang strategis, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Faktor-faktor Internal**

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi yang dimiliki oleh KUBE sebagai salah satu kekuatan dalam mengelola usaha KUBE ternak di Kelurahan Tanjunggading.</li> <li>• Jumlah anggota KUBE yang memadai dari segi kuantitas.</li> <li>• Sebagian besar anggota KUBE memiliki komitmen dan kemauan yang tinggi terhadap pencapaian tujuan usahanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya modal dan anggaran untuk membiayai usaha KUBE.</li> <li>• Masih terdapatnya anggota KUBE yang belum kompak dalam mengelola usahanya yaitu masih terdapat anggota KUBE yang membuka usahanya sendiri secara perseorangan.</li> <li>• Belum adanya pemasaran produk yang pasti yang disebabkan oleh belum terjalinnya kemitraan dengan pihak luar terutama pangsa pasar yang menerima produk usaha KUBE.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan komunitas yaitu adanya pandangan positif dari masyarakat disekitarnya terhadap kegiatan KUBE, rasa kegotongroyongan dan kerja sama yang baik, saling bahu membahu dalam mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan keluarganya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang kompaknya dalam penentuan harga jual produk.</li> <li>• Kualitas produk yang tidak kompetitif.</li> <li>• Tidak adanya inovasi dan kreativitas dalam memilih jenis usaha KUBE.</li> <li>• Masih rendahnya pemahaman dan kemampuan anggota KUBE dalam penguasaan teknologi dan informasi.</li> </ul>

**Tabel 2**  
**Faktor-faktor Eksternal**

Peluang (O)	Ancaman (T)
a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Nomor 480 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2010. b. Otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan potensi dan mengelolanya guna meningkatkan daya saing daerah. c. Peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha di sektor peternakan dengan komoditas ternak yang dikembangkan dan sangat strategis dalam menciptakan daya dorong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. d. Terbuka peluang kesempatan untuk berusaha atau kesempatan kerja. e. Kemajuan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan KUBE.	a. Lemahnya pemanfaatan kemajuan teknologi. b. Manajemen dan pendampingan yang masih lemah. c. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam pengembangan usahanya. d. Kondisi dan potensi alam yang kurang mendukung.

**Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

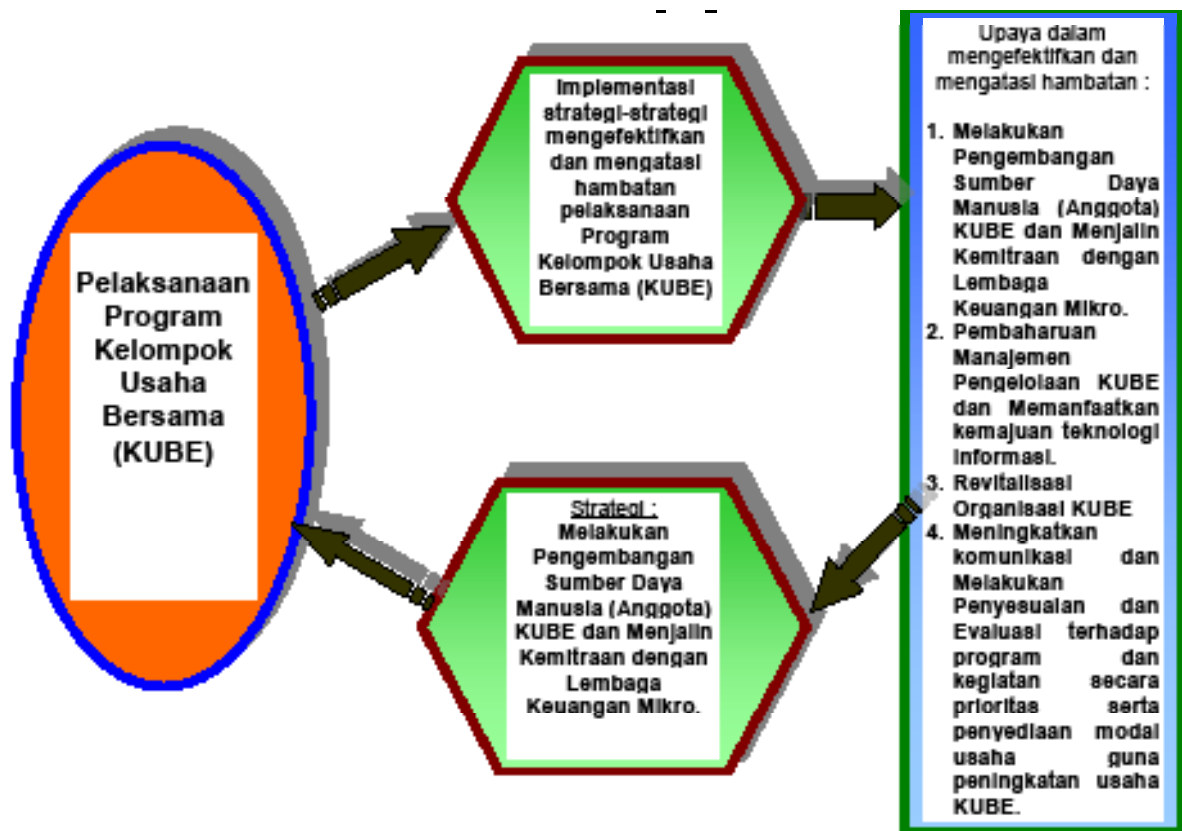
**Tabel 3**  
**Matriks SWOT dan Variasi Isu Strategis mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjunggading**

IFAS	<p><i>STRENGTH (S)</i> Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi yang dimiliki oleh KUBE,</li> <li>Jumlah anggota KUBE yang memadai dari segi kuantitas,</li> <li>Sebagian besar anggota KUBE memiliki komitmen dan kemauan yang tinggi terhadap pencapaian tujuan usahanya,</li> <li>Adanya dukungan komunitas.</li> </ol>	<p><i>WEAKNESS (W)</i> Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya modal dan anggaran untuk membiayai usaha KUBE,</li> <li>Masih terdapatnya anggota KUBE yang belum kompak dalam mengelola usahanya,</li> <li>Belum adanya pemasaran produk yang pasti,</li> <li>Kurang kompaknya dalam penentuan harga jual produk,</li> <li>Kualitas produk yang tidak kompetitif,</li> <li>Tidak adanya inovasi dan kreativitas dalam memilih jenis usaha KUBE</li> <li>Masih rendahnya pemahaman dan kemampuan anggota KUBE dalam penguasaan teknologi dan informasi.</li> </ol>
	EFAS	

Setelah melakukan pembahasan terhadap rumusan permasalahan dalam penelitian, ditemukan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Permasalahan yang diperoleh dalam pelaksanaan program usaha KUBE di Kelurahan Tanjunggading telah melahirkan

langkah stratejik yang direkomendasikan untuk mengefektifkan dan mengatasi hambatan pelaksanaan program KUBE di Kelurahan Tanjunggading.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 2 berikut.



Gambar 2

Langkah Strategik untuk Mengatasi Hambatan dan Mengefektifkan Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjunggading Kota Bandar Lampung

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjunggading sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, tetapi masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan. Program yang belum dapat tercapai sesuai dengan tujuan yaitu keberlangsungan program dalam penambahan modal usaha.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan

Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

### (a) Faktor Pendukung

- 1) Kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui KUBE adalah aktifnya anggota dalam mengelola usahanya.
- 2) Motivasi anggota untuk melaksanakan dan mengelola usaha cukup tinggi.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilihat dari antusias dan harapan masyarakat dalam menghadiri setiap pertemuan.
- 4) Pembinaan dari pemerintah daerah baik itu supervisi dan bimbingan



mengenai usaha yang sedang dijalankan.

**(b) Faktor Penghambat**

- 1) Manajemen dan pendampingan yang belum efektif.
  - 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia (anggota) yang masih rendah.
  - 3) Tidak adanya penambahan modal usaha guna pengembangan kelompok usaha bersama.
  - 4) Pemasaran hasil produksi yang belum menjangkau pasar yang salah satunya ditentukan oleh faktor kemampuan menjalin kerja sama/kemitraan usaha.
  - 5) Persaingan Usaha, dimana KUBE yang ada di kelurahan Tanjunggading dari 10 KUBE jenis usahanya sama yaitu ternak domba, sehingga persaingan usaha semakin ketat.
3. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yaitu:
- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Anggota) KUBE dan Menjalinkan Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan tingkat strategisnya mendapat total skor 35, dengan skor rata-rata 2,69.
  - b. Manajemen Pengelolaan KUBE dan Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi berdasarkan tingkat strategisnya mendapat total skor 32, dengan skor rata-rata 2,46.
  - c. Revitalisasi Organisasi KUBE berdasarkan tingkat strategisnya mendapat total skor 30, dengan skor rata-rata 2,31.
  - d. Melakukan Penyesuaian dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan secara prioritas serta penyediaan modal usaha guna peningkatan usaha KUBE berdasarkan tingkat strategisnya mendapat total skor 29, dengan skor rata-rata 2,23.

**Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Guna mengaktifkan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Meningkatkan pemodalannya KUBE dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan tambahan dengan syarat ringan/tanpa jaminan dan pembentukan pemodalannya swadaya melalui kegiatan arisan kelompok.
  - b. Perlu adanya sumbangan sosial wajib bagi anggota dalam bentuk iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) sebagai perekat hubungan sosial dan kerja sama di antara sesama anggota KUBE.
  - c. Pemilihan jenis usaha yang didasarkan kepada minat anggota dengan mempertimbangan potensi dan sumber daya alam yang ada.
2. Adanya faktor Penghambat Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjunggading, maka yang perlu dioptimalkan adalah:
  - a. Mengevaluasi manajemen pengelolaan KUBE;
  - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (anggota), dengan cara mendatangkan ahli bidang peternakan, penyuluhan-penyuluhan, magang ke peternakan yang sudah sukses atau memberikan diklat;
  - c. Menjalinkan kerja sama dengan para pengusaha sukses (konglomerat);
  - d. Meningkatkan jaringan Pemasaran, dengan cara mengikuti kegiatan pameran, melaksanakan pelatihan pemasaran dan penguasaan jaringan informasi;

- e. Melakukan kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki jaringan pemasaran dan peningkatan kualitas produk ternak.
3. Saran ditinjau dari aspek keilmuan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama yaitu tentang: Administrasi KUBE, Pertanggungjawaban KUBE, Manajemen KUBE, Pengawasan KUBE, dan Struktur.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Pradjasto Hardojo, dkk, 2008, *Mendahulukan si Miskin: buku sumber bagi Anggaran Pro Rakyat*, LKiS, Yogyakarta.
- Ambar, Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*, Gaya Media Yogyakarta.
- Amirin, M. Tatang. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bryson, John M, 2003, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, (Terjemahan) Oleh Miftahuddin, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Irawan, Prasetya, 2007, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Cetakan I)*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jones, Charles O. 1996. (Penyunting Ricky Ismanto), *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasir, Mohamad, 2005, *Metode Penelitian*, PT Ghalia Indonesia, Bogor.
- The Liang, Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Liberty, Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P, Terj. Jusup Udaya, 1995, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Edisi 3, Alcan, Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 2005, *Mew-irahsakan Birokrasi (Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector)*, Penerjemah Abdul Rosyid, PPM, Jakarta.
- Tyson, Shain, 1992, *Perilaku Organisasi (terjemahan oleh Dedi Jakobus dan Dwi Prabandini)*, Andi, Yogyakarta.
- Gibson, James L. Ivancevich, John M. and Donnely, James H Jr, 1997, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*, Erlangga, Jakarta.
- Hikmat, Harry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Miles, B. Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta;
- Moleong, Lexy, J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mulyadi, 2001, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- R. Wrihatbolo, Randy dan Nugroho D, Riant, 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Rusidi, 2006, *Metodologi Penelitian (hand-out), Elaborasi Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Unpad*, Bandung (tidak dipublikasikan).

- Salusu, J, 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik, Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Publik*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sumaryadi, Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Sugiyama, Gima, 2008, *Metode Riset, Bisnis dan Manajemen*, Guardaya Intimarta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2004. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Spektrum Pemikiran*. Lembaga Penerbitan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (LPPKS) STKS. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetrisno, 2002. *Administrasi dan Ilmu Politik*. Bina Aksara. Bandung.
- Subroto, 2005. *Administrasi dan Ilmu Politik*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Westa, Pariata, Sutarto dan Ibnu Syamsi. 1985. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kab/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Dalam R.I. Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 239/PS.5/KPTS/V/2011 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLBS) Tahun 2010.
- Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandarlampung 2014-2018.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandarlampung Tahun 2017.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016.
- Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandarlampung Tahun 2016.
- Sumber Lain**
- Randy R. Wrihatnolo, 2008, *Realita Kemiskinan 2016 dan Program untuk si Miskin (online)*, Tersedia: <http://wrihatnolo.blogspot.com/2017/07/realita-kemiskinan-2017-dan-program.html>, (7 Pebruari 2019).

